

49

EKSISTENSI PROFESI PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA

Oleh :

Lina Lisnawati, Santoso Tri Raharjo, & Muhammad Fedryansyah.

Email:

(santosotriraharjo@gmail.com; fedry_cons@yahoo.com)

Abstrak

Perjalanan panjang eksistensi Pekerjaan Sosial di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan. Masih banyak pihak yang menganggap bahwa Pekerjaan Sosial merupakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Asal ada benda atau materi, serta kemauan untuk membantu orang lain atau menyelesaikan masalah sosial maka ia disebut Pekerja Sosial. Hal itu yang pada akhirnya membuat jumlah tenaga Pekerjaan Sosial masih minim. Eksistensi yang dimaksud adalah adanya kebutuhan dari masyarakat secara nyata terhadap Pekerja Sosial yang secara profesi atau tenaga ahli lainnya secara signifikan. Bagaimanapun juga, eksistensi terhadap Pekerjaan Sosial tidak begitu saja turun dari langit, melainkan hanya akan dapat diperoleh ketika para Pekerja Sosial dapat menunjukkan karya nyatanya dalam menciptakan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Indonesia. Penggunaan istilah Pekerja Sosial Profesional inilah yang membedakan dengan profesi lainnya, dimana gelar tersebut disematkan pada orang-orang yang telah menempuh jenjang pendidikan di Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Kata kunci : Profesi Pekerjaan Sosial, Pekerjaan Sosial, Kesejahteraan Sosial.

Pendahuluan

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada, yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Berkembangnya masalah sosial akibat dari krisis, konflik sosial, bencana alam dan gejala disintegrasi sosial, membutuhkan penanganan secara holistik dan komprehensif

Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain ;(1) faktor ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dll). (2). faktor budaya (perceraian, kenakalan remaja, dll).(3). faktor biologis (penyakit menular, keracunan makanan, dsb). (4). faktor psikologis (penyakit syaraf, aliran sesat, dsb).

Masalah sosial tersebut dialami oleh anak, keluarga, komunitas dan masyarakat; yang mengalami hambatan fungsi sosial (disfungsi sosial) atau mengalami masalah struktural dan budaya, antara lain:

1. Hambatan fisik, misalnya kecacatan fisik, kecatatan mental,
2. Hambatan ilmu pengetahuan, misalnya kebodohan, kekurangtahuan informasi,
3. Hambatan keterampilan, misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja modern,
4. Hambatan mental/sosial psikologis, misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi/stres.
5. Hambatan budaya, misalnya mempertahankan tradisi yang kurang mendukung kemajuan sosial/modernisasi.

6. Hambatan geografis, misal keterpencilan terhadap fasilitas pelayanan sosial dasar.

Dalam kondisi demikian, diperlukan intervensi Pekerjaan Sosial bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Pelayanan Kesejahteraan Sosial didukung dengan kebijakan dan program pembangunan nasional bidang Kesejahteraan Sosial. Dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai bagian dari pemerintah pusat yang mempunyai mandat dan tugas pokok serta fungsi di bidang pembangunan Kesejahteraan Sosial. Kemampuan pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam menangani masalah sosial dalam lima tahun terakhir hanya menjangkau rata-rata sekitar 8% dari total Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mencapai sebanyak 15,5 juta jiwa.

Dalam situasi dan kondisi perkembangan permasalahan sosial dan tuntutan publik terhadap orientasi kebijakan dan program pembangunan Kesejahteraan Sosial yang bertumpu pada keadilan untuk semua dan melindungi hak asasi manusia pada masa yang akan datang, dibutuhkan tenaga-tenaga profesional Pekerjaan Sosial.

Jika rasio Pekerja Sosial (*Social Worker*) dengan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial minimal satu berbanding 100, maka kebutuhan Pekerja Sosial di Indonesia paling sedikit sebanyak 155.000 orang. Estimasi jumlah PMKS tahun 2012 sebanyak 15,5 juta keluarga, sedangkan jumlah Pekerja Sosial saat ini sekitar 15.522 orang. Dengan demikian masih diperlukan sekitar 139.000 Pekerja Sosial. (diunduh <http://bbppksmakassar.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=182> tanggal 01/12/2014 pukul 23:22)

Pekerjaan Sosial.

Menurut Walter A. Friedlander dan Robert Z. Apte didalam Bukunya yang berjudul : *A Concepts and Methods of Social work*, mendefinisikan Pekerjaan Sosial adalah :

"Social work is a professional service, based on scientific knowledge and skill in human relations, which help individuals, groups, or communities obtain social or personal satisfaction and independence" (Friedlander dan Apte, 1980:4).

Pekerjaan Sosial merupakan suatu pelayanan profesional, yang prakteknya didasarkan kepada pengetahuan dan ketrampilan ilmiah tentang relasi manusia, sehingga dapat membantu individu, kelompok dan masyarakat mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan.

Sedangkan Zastrow (2004) dalam *Introduction to Social Work and Social Welfare*,

" Social Problems, Services, and Current Issues" mendefinisikan Pekerjaan Sosial sebagai berikut: *"Social Work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals"* (Zastrow,1982: 12).

Pekerjaan Sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Jika kita mengacu kepada ke dua pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa Pekerjaan Sosial merupakan suatu kegiatan profesional untuk menolong manusia, baik individu, kelompok, dan masyarakat dimana pelayanannya didasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, agar mereka (individu, kelompok, dan masyarakat) dapat meningkatkan/memperbaiki kemampuan berfungsi sosialnya. Dengan tujuan, mereka dapat mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan.

Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang membantu manusia mengatasi permasalahannya baik Ia sebagai individu, atau sebagai anggota suatu kelompok dengan teknik relasi manusia. Sesuai hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial dia akan selalu bergantung dengan manusia lainnya, Ia

tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena tidak semua masalah yang dihadapinya dapat ditangani sendiri, pasti membutuhkan solusi dari individu lainnya baik anggota keluarga, teman, ataupun siapa saja dari luar dirinya.

Konsep Dasar Profesi Pekerjaan Sosial.

Dari pengertian diatas ada beberapa konsep yang mendasari Praktek Pekerjaan Sosial yang dapat dipakai sebagai pedoman bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Beberapa konsep tersebut adalah :

1. Pekerjaan Sosial adalah kegiatan Profesional.

Suatu kegiatan dapat dikatakan sebuah profesi jika dia memiliki minimal dua unsur pokok.

Dalam Bukunya Dwy Heru Sukoco menjelaskan unsur pokok Profesi Pekerjaan Sosial adalah :

A. Kegiatan tersebut harus berlandaskan kepada ilmu pengetahuan, keahlian/keterampilan, dan nilai-nilai (*value*). Artinya kegiatan yang dilakukan dilaksanakan Pekerja Sosial yang telah mendapatkan pendidikan baik teori serta praktek di Sekolah Khusus/Perguruan Tinggi yang memberikan pendidikan Pekerjaan Sosial. Melalui pendidikan khusus juga Pekerja Sosial diajarkan berbagai teknik-teknik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Klien sebagai keahlian Pekerja Sosial. Demikian pula nilai-nilai juga dipelajari dalam pendidikan Pekerjaan Sosial agar Pekerja Sosial dalam menangani masalah Klien memiliki batasan-batasan sehingga tidak terjadi penyimpangan praktek. Dengan adanya ketiga kerangka dasar ini maka Praktek Pekerjaan Sosial dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

B. Kegiatan tersebut harus diarahkan kepada kepentingan umum (*public interest*). Artinya, Suatu kegiatan harus diarahkan untuk semua tanpa memihak kepada golongan tertentu. Pelayanan yang diberikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau bermanfaat bagi kepentingan umum. Tidak boleh membedakan masyarakat tingkat atas, menengah atau bawah. Apabila suatu profesi diperuntukkan hanya bagi golongan tertentu, atau melakukan diskriminasi maka telah melanggar Hakekat Kelahiran dan tanggung jawab sosialnya.

2. Praktek Pekerjaan Sosial merupakan kegiatan Pertolongan.

Seperti halnya Profesi lain, Profesi Pekerjaan Sosial juga merupakan Profesi Pertolongan (*Helping action*). Akan tetapi Konsep Pertolongan Profesi Pekerjaan Sosial berbeda dengan Konsep Profesi lain, Konsep Pertolongan Pekerjaan Sosial adalah "*to help people to help themselves*" (menolong orang agar orang mampu menolong dirinya sendiri). Berlandaskan kepada konsep di atas, maka pertolongan Pekerjaan Sosial mempunyai dua ciri pokok, yaitu:

A. Orientasi pertolongan Profesi Pekerjaan Sosial dipusatkan terhadap kepentingan Klien/Orang yang ditolong.

B. Pekerja Sosial selalu bekerja sama dengan Klien (*Working with Client*).

3. Klien yang dibantu adalah orang baik individu atau kolektifitas (keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat).

Pekerja Sosial harus memiliki teknik-teknik serta metode-metode untuk membantu klien yang mengalami masalah dalam interaksi sosial dengan lingkungannya, sehingga memperlemah fungsi Sosialnya dan menimbulkan masalah.

4. Intervensi Pekerjaan Sosial dipusatkan kepada peningkatan fungsi sosialnya.

Intervensi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial harus mengarah kepada kemauan, harapan-harapan, kebutuhan Klien baik fisik dan sosial, serta potensi-potensi yang ada dalam diri Klien. Untuk mengetahui unsur-unsur diatas Pekerja Sosial harus melakukan asesmen terhadap Klien.

5. Dasar pengetahuan ilmiah Pekerjaan Sosial dapat di kelompokkan kepada tiga jenis, yaitu: *tested*, *hypothetical* dan *assumptive knowledge*.

6. Pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk praktek Pekerjaan Sosial ditentukan oleh tujuan, fungsi dan permasalahan yang dihadapi.
7. Internalisasi nilai dan pengetahuan profesional merupakan kebutuhan vital bagi para Pekerja Sosial Profesional.
8. Keterampilan profesi Pekerjaan Sosial diekspresikan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.
(Skidmore dan Thackeray, 1982: 7).

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial adalah sistem program suatu negara, manfaat, dan layanan yang membantu orang, ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan kesehatan yang mendasar untuk pemeliharaan masyarakat. Reid (1995) menggambarkan Kesejahteraan Sosial sebagai "ide, bahwa ide menjadi salah satu dari masyarakat yang layak yang menyediakan kesempatan untuk bekerja, memberikan keamanan yang wajar dari keinginan dan penyerangan, mengutamakan kejujuran dan evaluasi berdasarkan pada jasa individu, dan ekonomi produktif dan stabilitas". (hal. 206).

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Dari kedua definisi di atas, Kesejahteraan Sosial merupakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat fisik maupun nonfisik, yang pada akhirnya akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta dapat menjalankan perannya di masyarakat.

Eksistensi Profesi Pekerjaan Sosial

Eksistensi Profesi Pekerjaan Sosial telah memasuki tahapan penting dan strategis dalam rangka memperkuat perkembangan Pekerja Sosial di Indonesia, antara lain:

Pertama, semakin kuatnya pengaturan Pekerja Sosial Profesional dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan Pekerja Sosial sebagai "the primary profession" dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi landasan kuat untuk penyediaan Pekerja Sosial profesional di Indonesia.

Kedua, Pekerja Sosial telah memasuki era baru yaitu Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dicanangkan oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 29 November tahun 2012 di Jakarta. Sertifikasi difasilitasi oleh pemerintah melalui Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) yang merupakan pengakuan terhadap Pekerja Sosial dan pada gilirannya menerbitkan lisensi. Demikian juga untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan di akreditasi oleh badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) hal ini dapat memperkuat eksistensi profesi Pekerja Sosial.

Ketiga, kementerian Sosial memprakarsai penyusunan naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial yang saat ini sudah di bahas ditingkat panja Komisi VIII DPR RI yang merumuskan secara legal definisi Pekerjaan Sosial dan praktik Pekerjaan Sosial, persyaratan menjadi Pekerja Sosial, jenjang pendidikan, kedudukan, tugas dan fungsinya, sertifikasi, keberadaan asosiasi profesi, asosiasi pendidikan dan kewajiban lembaga kesejahteraan pelayanan sosial untuk menggunakan Pekerja Sosial bersertifikat dan berlisensi.

Keempat, kebijakan saat ini yang menjadi arus utama Kementerian Sosial adalah “*one stop services*” dengan mengintegrasikan pelayanan pada satu sistem dengan dicanangkan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera atau PANDU GEMPITA, hal ini dilaksanakan di 5 (lima) wilayah yaitu Kota Sukabumi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sragen, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Berau. Pekerja Sosial menjadi garda terdepan sebagai profesi utama untuk berbagai program Pandu Gempita.

Saat ini kebutuhan tenaga profesional di bidang Pekerjaan Sosial masih sangat besar mengingat estimasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013 sekitar 15,5 juta rumah tangga, sedangkan jumlah Pekerja Sosial yang baru sekitar 15.522 orang. Jika ratio ideal misalnya 1 Pekerja Sosial menangani 100 rumah tangga, maka masih dibutuhkan kurang lebih 139.000 orang Pekerja Sosial. Begitu pula dibutuhkan Pekerja Sosial medis di rumah sakit, Pekerja Sosial Industri, Pekerja Sosial Forensik di Lapas/Bapas, Pekerja Sosial Klinis di Lembaga-Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Pekerja Sosial Spesialis Perlindungan anak, Pekerja Sosial Spesialis Manajemen Bencana dan sebagainya. Konferensi ini diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap profesi Pekerjaan Sosial berupa Rencana Aksi Nasional atau Roadmap Pengembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia. (dikutip dari <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=17908> tanggal 14/12/ 2014 pukul 00:06)

Operasionalisasi Pekerjaan Sosial

Pendidikan Pekerjaan Sosial mempunyai tanggung jawab untuk menanamkan dan mencetak intelektual sebagai kader bangsa yang peduli terhadap penanganan masalah sosial. Utamanya di wilayah Timur Indonesia yang hingga kini masih banyak membutuhkan Pekerja Sosial untuk melakukan pemberdayaan dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, merupakan suatu tugas yang mulia bagi tenaga Kesejahteraan Sosial untuk “Membangun sinergisitas dan profesionalitas Pekerja Sosial yang handal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Timur Indonesia.” Sangat disadari bahwa Pekerjaan Sosial haruslah menjadi dekat dengan konteks di mana Ia diaplikasikan. Oleh karena itu, memaknai dan mempraktekan Pekerjaan Sosial yang berbasis multikultur sesuai dengan karakteristik Bangsa Indonesia adalah tugas yang perlu dilakukan agar Pekerjaan Sosial dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai negara kesatuan dengan ribuan pulau besar dan kecil, dihuni oleh penduduk dari berbagai etnik dan suku bangsa. Paling sedikit terdapat 300 etnik atau suku-bangsa di Indonesia. Pekerja Sosial yang mendedikasikan diri dalam konteks Indonesia perlu memahami budaya multikultur. Kemampuan responsif atas keragaman budaya inilah yang disebut kompetensi budaya dari Pekerja Sosial (*Multicultural Social Work*).

- a) Untuk mengintegrasikan kompetensi budaya pada Pekerjaan Sosial, maka ada lima prinsip dasar yang perlu dipahami: Menghargai perbedaan dan keragaman budaya;
- b) Menerapkan instrumen penilaian budaya dalam praktek Pekerjaan Sosial;
- c) Melatih kesadaran Pekerja Sosial tentang dinamika yang terjadi pada saat interaksi lintas-budaya;
- d) Memasukkan pengetahuan budaya ke dalam kurikulum pendidikan dan melatih sikap lentur terhadap keragaman budaya;
- e) Melatih kerjasama lintas-budaya, adaptasi budaya, dan pemahaman keragaman budaya.

Situasi sebagaimana gambaran tadi memotivasi kita untuk mengembangkan sistem Pekerjaan Sosial dalam konteks Indonesia, yang selaras dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi dan budaya Indonesia. Dalam upaya mendukung pengembangan Pekerjaan Sosial sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia, perlu mencermati dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan Pekerjaan Sosial berbasis kompetensi generalis dan spesialis

Praktek Pekerjaan Sosial adalah suatu pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam relasi kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu, baik secara perseorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat untuk mencapai kemandirian secara pribadi dan sosial. Berkembangnya masalah sosial yang semakin kompleks, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan Pekerja Sosial yang tidak hanya mampu melaksanakan praktek Pekerjaan Sosial secara generalis, namun mengarah pada spesialisasi kompetensi Pekerjaan Sosial, seperti Pekerjaan Sosial dengan anak, keluarga dan sekolah; Pekerjaan Sosial dalam situasi bencana; Pekerjaan Sosial medis dan kesehatan publik; Pekerjaan Sosial dengan disabilitas; Pekerjaan Sosial forensik/ koreksional; dan lain-lain. Kebutuhan Pekerja Sosial yang spesialis dapat dipenuhi apabila sistem pendidikan dan pelatihan profesi Pekerja Sosial juga mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pekerjaan Sosial spesialis.

2. Mengembangkan praktek Pekerjaan Sosial berbasis perseorangan, keluarga dan komunitas yang terintegrasi

Kebijakan dan program Kesejahteraan Sosial pada masa lalu cenderung dilaksanakan secara sektoral/fragmentaris, jangkauan pelayanan sosial terbatas, reaktif merespon masalah yang aktual, fokus pada pelayanan berbasis institusi/panti sosial, serta belum adanya rencana strategis nasional yang dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pada masa yang akan datang diperlukan kebijakan dan program Kesejahteraan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan, serta dapat menjangkau seluruh warga negara yang mengalami masalah sosial, melalui sistem dan program Kesejahteraan Sosial yang melembaga dan profesional, serta mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Para Pekerja Sosial dituntut memiliki kompetensi Pekerjaan Sosial yang mengintegrasikan pendekatan dan intervensi kepada perseorangan, keluarga dan komunitas sebagai satu kesatuan entitas praktek Pekerjaan Sosial. Keberadaan institusi panti sosial perlu direvitalisasi sebagai pusat layanan Kesejahteraan Sosial berbasis keluarga dan komunitas.

3. Mengembangkan organisasi profesi Pekerja Sosial yang mandiri

Keberadaan organisasi profesi Pekerja Sosial memiliki keunikan dan berbeda dengan negara-negara lain. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia lahir atas semangat para alumni Perguruan Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial untuk berhimpun dan berserikat atas nama organisasi profesi, walaupun sistem pendidikan profesi dan sertifikasi Pekerja Sosial belum lahir. Kehadiran sistem sertifikasi bagi Pekerja Sosial akan melahirkan para Pekerja Sosial sebagai profesi yang diakui dan bersertifikat. Adanya sertifikasi bagi Pekerja Sosial, akan menjadikan profesi Pekerja Sosial memperoleh lisensi/mandat bahkan dapat menyelenggarakan praktek secara mandiri. Oleh karena itu, organisasi profesi yang ada sekarang ini diharapkan dapat merevitalisasi diri sebagai organisasi profesi Pekerja Sosial yang mandiri.

4. Membangun sistem pencegahan secara dini munculnya masalah sosial

Penekanan kebijakan untuk menjadikan Kementerian Sosial bukan sebagai “pemadam kebakaran” yang hanya beraksi ketika masalah sosial telah marak. Kementerian Sosial senantiasa bersinergi menggalang kekuatan dengan masyarakat serta komponen bangsa lain untuk mencegah permasalahan sosial secara dini. Dampak sosial yang ditimbulkan semakin berat jika masalah sosial telah berlangsung dan membawa dampak sosial ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, sangat diperlukan keterlibatan perguruan tinggi lainnya yang mampu menjadi pilar utama dalam pencegahan secara dini munculnya masalah sosial. Hal ini penting karena menurut sebagian kalangan, Perguruan Tinggi tidak boleh lengah mengemban peran sebagai inisiator dalam pengembangan “sistem

peringatan dini”. Pentingnya “*early warning system*” bukan hanya untuk mencegah bencana alam namun juga untuk pencegahan berbagai masalah sosial/bencana sosial. Pekerja Sosial dalam mengemban mandatnya memiliki tugas untuk membangun sistem peringatan dini berbasis keluarga dan komunitas terhadap berbagai ancaman/risiko bencana sosial, budaya, ekonomi, dan politik, sebelum semuanya sudah menjadi begitu buruk. Untuk itu secara sistematis pendidikan Kesejahteraan Sosial dapat menjadi perintis untuk melahirkan pendekatan khas guna mencegah terjadinya atau meluasnya masalah sosial yang dapat diaplikasikan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

5. Menanamkan kepekaan dan kesalehan sosial

Kepekaan dan kesalehan sosial tidak muncul begitu saja. Ia merupakan hasil dari sosialisasi nilai dan proses belajar. Kepekaan sosial sangat penting mengingat sampai saat ini struktur sosial budaya masyarakat Indonesia masih sangat beragam dalam pencapaian taraf Kesejahteraan Sosial. Kepekaan dan kesalehan sosial akan menjadi kekuatan yang sangat penting bagi penanganan masalah sosial. Selain khas Indonesia, nilai-nilai ini diyakini masih kuat melekat pada masyarakat Indonesia. Kesenjangan sosial yang tinggi antara kaum kaya dan miskin berisiko terjadi kecemburuan sosial dan munculnya sikap anti sosial/anti kemapanan, bahkan dapat menimbulkan gejolak kerusuhan dan disintegrasi sosial. Dalam kondisi seperti ini, sifat individualistik yang hanya mementingkan diri sendiri sangat tidak cocok di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2011, diketahui indeks Gini Ratio sudah mencapai angka 0,41 yang menunjukkan kesenjangan sosial ekonomi semakin tinggi.

Pendidikan Kesejahteraan Sosial harus mampu merangsang dan mendorong masyarakat agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial atau solidaritas sosial sebagai jati diri bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Harapan kita kepada para Pekerja Sosial agar memperkuat kepekaan dan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya melalui revitalisasi program/kegiatan pengabdian masyarakat yang lebih terencana, terarah dan terpadu, sambil menginternalisasikan kepekaan dan kesalehan sosial Civitas Academica. Sifat-sifat *Sidik, Amanah, Fathonah dan Tablig*, selayaknya menjadi citra diri Pekerja Sosial di Indonesia.

6. Optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi

Peran Pendidikan Kesejahteraan Sosial dalam perkembangan kehidupan sosial tercermin dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan dharma pendidikan diharapkan perguruan tinggi dapat mencerahkan masyarakat. Dengan dharma penelitian diharapkan dapat melakukan temuan-temuan inovasi teknologi Pekerjaan Sosial. Adapun dharma pengabdian masyarakat diharapkan mampu mengaplikasikan kompetensi Pekerjaan Sosial dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Optimalisasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain dengan mengemas substansinya agar relevan dengan kebutuhan masyarakat khususnya dalam rangka mengatasi masalah sosial di masyarakat. Masalah sosial dapat didekati dari sisi akademis untuk dapat diurai dan dipahami, kemudian masalah sosial dapat dikaji, diteliti agar menghasilkan solusi atau model penanganan yang tepat cara dan diterapkan melalui pengabdian masyarakat dalam kesempatan sesegera mungkin. (dikutip dari <http://www.organisasi.org /1970/01/definisi-pengertian-masalah-sosial-dan-jenis-macam-masalah-sosial-dalam-masyarakat.html> pada tanggal 13/12/14 pukul 00:22)

Penutup

Menjadi Pekerja Sosial itu tidak mudah. Pekerja Sosial bukan hanya untuk menyalurkan/memberikan bantuan semata. Sangatlah tidak tepat jika masih ada pihak-pihak yang mengatakan semua orang dapat menjadi Pekerja Sosial karena Pekerjaan Sosial dapat dilakukan bila ada kemauan untuk memberi maka disebut Pekerjaan Sosial. Banyak hal yang lebih penting yang

dapat dilakukan oleh Pekerja Sosial bagi terciptanya kehidupan yang kondusif terutama dari masalah sosial.

Seorang Pekerja Sosial Profesional, dalam melaksanakan Intervensinya terhadap Klien, harus didasarkan kepada 3 Kerangka Pekerjaan Sosial, yaitu: ilmu pengetahuan, keahlian/keterampilan dan nilai-nilai. untuk meningkatkan keberfungsian sosial Klien.

Pekerja Sosial juga diharuskan untuk memahami tentang teknik komunikasi dan berrelasi dalam Pekerjaan Sosial, memahami langkah-langkah intervensi sehingga masalah Klien dapat diselesaikan dengan tepat. Oleh karenanya kehadiran Profesi Pekerjaan Sosial sangatlah dibutuhkan didalam masyarakat. Apalagi dengan semakin kompleksnya kehidupan kita, jelas semakin banyak timbul masalah-masalah baik yang sifat nya individu, ataupun kolektif.

Daftar Pustaka

Reid, K. 1999. *Truancy and Schools*.Routledge Taylor and Francis Group:New York and London.
Skidmore. *Introduction to Social Work Sixth Edition*. Prentice Hall International Edition.
Wibawa, Budhi, et al. 2010. *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Widya Padjadjaran: Bandung.

Sumber Jurnal/Artikel

Azril. 2014. *Eksistensi Pekerja Sosial Diperkuat Akreditasi*. Tribun, 3 Oktober 2014.
Badiklitkesos. 2013. *Sejarah Baru Perkembangan Pekerja Sosial di Indonesia*. Jakarta: OHH.
P4S Kemos. 2014. *Standar Registrasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pekerja Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
Eksistensi Pekerja Sosial.2013. Kementrian Sosial. Jakarta : P4S
Ayu. Kurangnya Pekerja Sosial Karena Belum Adanya Payung Huku,. 2014.

Sumber lainnya:

http://www.iasswaiets.org/uploads/file/20140627_SW%20definition-Indonesian.pdf
[http://syakhrudin.com/2013/02/06/Pekerjaan Sosial Sebuah Profesi/](http://syakhrudin.com/2013/02/06/Pekerjaan_Sosial_Sebuah_Profesi/) diunduh pada tanggal 15/09/2014 pukul 20:59
<http://www.iassw.aiets.org> diunduh pada tanggal 15/09/2014 pukul 19:15
[http://www.policy.hu/suharto/modul a/makindo 38.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_38.htm) diunduh pada tanggal 03/11/2014 pukul 22:33
<http://kesos.unpad.ac.id/?p=711> diunduh pada tanggal 03/11/2014 pukul 21;11
<http://www.kessosuinjkt.ac.id/kolom-kajur/36-kolom-kajur/72-bedanya-pekerja-sosial-dengan-profesi-lain.html#ixzz3I3KDfy00> diunduh pada tanggal 03/11/2014 pukul 21:21
<http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-masalah-sosial-dan-jenis-macam-masalah-sosial-dalam-masyarakat.html> pada tanggal 13/12/14 pukul 00:22)